

Judul Paten : **APLIKASI CERDAS DETEKSI JENIS KERUSAKAN JALAN**

Penulis : **Puguh Budi Prakoso dan Yuslena Sari**

No. Paten : **EC00202148416**

Alamat website : -

Deskripsi : aplikasi ini adalah aplikasi cerdas untuk mendeteksi jenis kerusakan jalan dan dapat mempermudah proses klasifikasi jenis kerusakan jalan dengan menggunakan citra dari hasil klasifikasi sistem nantinya bisa digunakan sebagai informasi pendukung perhitungan perbaikan jalan.

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202148416, 20 September 2021

**Pencipta**

Nama : **Puguh Budi Prakoso dan Yuslena Sari**

Alamat : Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. Bridgen Hasan Basry Kayutangi , Banjarmasin, KALIMANTAN SELATAN, 70123

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Puguh Budi Prakoso dan Yuslena Sari**

Alamat : Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. Bridgen Hasan Basry Kayutangi , Banjarmasin, KALIMANTAN SELATAN, 70123

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **APLIKASI CERDAS DETEKSI JENIS KERUSAKAN JALAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 September 2021, di Banjarmasin

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000275819

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.